

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Yulianto, Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Barten, K. *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Fajar, Abdul Mukhtie. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2013).
- Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)
- Hanif, Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007).
- Lukman, Hakim. *Filosofi Kewenangan Organ dan Kelembagaan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2012).
- Mamudji Sri, Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2001).
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982).
- Soemitro Hanitijo, Ronny. *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Subarjo, dan Fajar Laksono. *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Sudikno, Martokusumo. *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1986).
- Suriansyah, Murhani. *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008).

Tim Reality. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Reality Publisher, 2008).

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Adminstrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Varma, SP. *Teori Politik Modern* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007).

JURNAL LAPORAN, PENELITIAN

Diah Imania, *Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Melalui Mahkamah Kehormatan Dewan*. (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Diponegoro Law Jurnal, Volume 5, Nomor 3, 2016)

Dipta, Septu Annisa. *Pelaksanaan Kewenangan Dewan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru Tahun 2009 – 2014* .(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Jurnal Media Neliti. Volume 4 Nomor 1, 2017).

Ihsan Trianto, Dian Ekasari, Maulizar. *Kajian Tugas Tenaga Ahli Badan Kehormatan DPRD Provinsi DKI Jakarta*, (Laporan penelitian, Jakarta, 2018).

Hilmi Fachruddin, *Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Dalam Kasus Korupsi Oknum Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 2014-2019 Selaku Bendahara Persupa Pati*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Penulisan Hukum. 2018)

Iskandar, *Optimalisasi Peran Badan Kehormatan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Studi Pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya*. (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Jurnal Nestor Magister Hukum, Volume 4 Nomor 1, 2016).

James Alm, R. H. Dkk, “Can Indonesia Decentralise Successfully? Plans Problems and Prospects”, (Bulletin of Indonesian Economic Studies, Volume 37, Nomor 1, 2001).

Mahfud, MD. *Capaian dan Proyeksi Hukum Indonesia* (Mahkamah Konstitusi, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 16, Nomor 3, Tahun 2009).

- Marlulak Pardede, *Efektivitas Putusan Badan Kehormatan DPR / DPRD*, (Laporan Akhir Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2018).
- Nuri, Evirayanti. *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD*. (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Diponegoro Law Review, Volume. 4, Nomor 2, Tahun 2009).
- Veronica, Victoria Hardhini. *Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Sebagai Parlemen Modern dan Terbuka*. (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Diponegoro Law Jurnal. Volume. 5, Nomor 3, Tahun 2016).
- Yommy Benkz, *Pemerintahan Daerah*, Makalah Academia Edu, 2016. (https://www.academia.edu/36809165/Makalah_Pemerintahan_Daerah diakses pada tanggal 8 Desember 2018).
- Yulianto, Anhar, *Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009-2015*, (Tesis Pascasarjana Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2012).

PERATURAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Keputusan Pimpinan DPRD DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.
- Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2006 tentang Kode Etik DPRD DKI Jakarta

INTERNET

Pemerintah net, 2018, Pembagian Urusan Pemerintahan, diakses dari, http://pemerintah.net/pembagian_urusan-pemerintahan-daerah-uu-no-232014/, pada tanggal 9 Desember.

Web DPRD DKI Jakarta, 2018, Struktur Badan Kehormatan, diakses dari <http://dprd-dkijakartaprov.go.id/badan/badan-kehormatan/>, pada tanggal 10 Desember 2018.

Academia edu, Pengertian dan filosofi Etika manusia, diakses dari https://www.academia.edu/5130417/BAB_I_Pengertian_and_Filosofi_Etika_Manusia_adalah, diakses pada tanggal 14 Januari.

WAWANCARA

Wawancara penulis dengan Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019, H. Achmad Yani, S.IP., M.Pd, pada tanggal 14 Januari 2019.

Wawancara penulis dengan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019, H. Syarifudin, S.H., M.H, pada tanggal 8 Januari 2019.

Wawancara penulis dengan Kepala Sub Bagian produk hukum, pengkajian dan evaluasi, Endang Sumardi, S.H., M.Si, pada tanggal 8 Januari 2019.

Wawancara penulis dengan Staff Badan-Badan DPRD DKI Jakarta, Supriadi S.H, pada tanggal 8 Januari 2019.